

PENDIDIKAN UMUM SEBAGAI SARANA INTEGRITAS BANGSA

Oleh : L. Hendrowibowo¹**Abstrak**

Pendidikan nasional, khususnya pendidikan tinggi saat ini terlalu bertumpu pada pendidikan spesialisasi, kurang memperhatikan *pendidikan umum*, sehingga tidak memiliki kekokohan dalam menghadapi krisis integritas bangsa seperti yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Tujuan pendidikan umum di Indonesia berupaya membina kepribadian manusia Indonesia seutuhnya.

Salah satu kendala mencapai integritas (keutuhan) bangsa adalah pluralisme yang heterogen dari masyarakat Indonesia dan konstelasi geografis sebagai negara kepulauan. Dalam menghadapi pluralisme tersebut, diperlukan paradigma yang rasional dan bijaksana, sehingga pluralisme tidak berkonotasi negatif, tetapi justru diposisikan secara positif dan konstruktif. Sebagai bangsa yang pluralis, harus siap menghadapi berbagai perbedaan, dengan menunjukkan sikap toleran serta hormat dan memberikan pengakuan terhadap persepsi yang berbeda dengan persepsi yang kita miliki.

Integritas bangsa Indonesia yang tersusun dalam suatu kesatuan *sejarah, nasib, kebudayaan, wilayah* dan *asas kerokhmanian* bersifat mutlak, menolak keras separatisme. Integritas bangsa tersebut dapat dicapai dengan berbagai cara, dan salah satu cara yang dipergunakan di Perguruan Tinggi dalam menyatukan bangsa adalah melalui pendidikan umum.

Pendahuluan

Pendidikan nasional, khususnya pendidikan tinggi saat ini terlalu bertumpu pada pendidikan spesialisasi, kurang memperhatikan *pendidikan umum*, sehingga tidak memiliki kekokohan dalam menghadapi krisis integritas bangsa seperti yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Pendidikan yang cenderung ke arah spesialisasi menyebabkan pula terkotak-kotaknya pengalaman belajar mahasiswa. Para mahasiswa hanya mempelajari disiplin ilmu atau spesialisasi dan sesuai dengan

¹ Dosen Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan FIP UNY

bakatnya saja, yang memungkinkan mereka dapat menjadi manusia “picik” dalam memahami bidang keilmuan atau keahliannya.

Di samping hal tersebut di atas, terjadi pula pengkotak-kotakan ranah (domain) dalam tujuan pendidikan. Dengan kata lain terjadi penonjolan atau pengutamaan pada salah satu ranah (domain) dalam tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Tujuan pendidikan hanya ditekankan pada kemampuan intelektual saja, atau ketrampilan tertentu saja, sedangkan tujuan yang lebih luas, yakni pendidikan umum yang mencakup pengembangan aspek afektif (nilai, moral, sikap, kematangan sosial dan emosional) kurang mendapat perhatian.

Pendidikan umum (*general education*) yang dimaksud dalam tulisan ini, bukanlah suatu jenis sekolah umum sebagai lawan dari sekolah kejuruan, melainkan suatu program yang terpadu dengan keseluruhan kurikulum, yang terdiri dari beberapa mata kuliah yang wajib diberikan kepada setiap mahasiswa, tanpa membedakan jurusan atau program studi. Mata kuliah ini diarahkan untuk membina kepribadian mahasiswa secara terpadu. Dengan demikian pendidikan umum ini akan diikuti oleh setiap siswa pada jalur pendidikan sekolah (pendidikan formal).

Program pendidikan umum tidak dimaksudkan untuk menciptakan kecerdasan intelektual saja atau keahlian khusus pada diri mahasiswa, melainkan lebih ditujukan pada pembinaan kepribadian mahasiswa secara menyeluruh/utuh, terutama pembinaan aspek afektifnya.

Pendidikan Umum

Pendidikan umum atau istilah aslinya *General Education* merupakan suatu istilah yang telah mulai diperkenalkan di Amerika Serikat pada akhir abad kesembilan belas (Chester W Harris, 1960: 570) dan lebih berkembang setelah memasuki abad kedua puluh. Munculnya istilah *General Education* berkaitan erat

dengan kecenderungan perkembangan dalam dunia pendidikan dan perkembangan kehidupan masyarakat sendiri.

Lahirnya pendidikan umum secara lebih jelas dikemukakan oleh Mc Connel (dalam Henry, 1952: 2) yang mengatakan bahwa

General education was a reaction against over specialization, against imbalance between the pursuit of special interest and the attainment of the broader cultivation that liberally educated man was traditionally expected to possess. It was reaction, too against the fragmentation of the curriculum and the disunity in the student's educational experience that were the inevitable concomitants of the vast increase in specialized knowledge ... general education was and is reaction against formalism in liberal education.

Dengan demikian menurut Mc Connel, ada empat hal yang melatar belakangi lahirnya pendidikan umum, yaitu

1. sebagai suatu reaksi terhadap keilmuan yang berlebihan;
2. sebagai reaksi terhadap kepincangan antara penguasaan minat-minat khusus dengan pemerolehan peradaban yang lebih luas;
3. sebagai reaksi terhadap pengkotak-kotakan kurikulum dan perpecahan pengalaman belajar siswa, dan
4. sebagai reaksi terhadap formalisme dalam pendidikan liberal.

Latar belakang lahirnya pendidikan umum, bukanlah semata-mata karena meningkatnya spesialisasi ilmu pengetahuan, melainkan juga karena pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat. Dalam kaitan ini Harvard Committee mengemukakan adanya tiga alasan yang melatarbelakangi semakin meningkatnya perhatian terhadap pendidikan umum dengan pernyataannya sebagai berikut:

Why was this concern (about general education) become so strong in late years? Among many reasons three stand out: the staggering expansion of knowledge produced largely by specialist and certainly conducing to it; the concurrent and hardly less staggering growth of our educational system with its maze of stages, function and kinds of

institutions; and not least, the evergrowing complexity of society itself. (Harvard Committee, 1950: 4).

Jika diperhatikan dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kelahiran dan berkembangnya pendidikan umum adanya kecenderungan spesialisasi ilmu pengetahuan yang berlebihan. Kelahiran dan berkembangnya pendidikan umum tersebut terjadi di dunia barat. Lantas pertanyaan kita, bagaimana perkembangan pendidikan umum di Indonesia? Menurut salah seorang pakar pendidikan di Indonesia, yakni Sikun Pribadi, pendidikan umum itu mempunyai tujuan sebagai berikut:

... tujuan pendidikan umum sebagai di antaranya berikut : (a) membiasakan siswa berfikir obyektif, kritis, dan terbuka; (b) memberikan pandangan berbagai jenis nilai hidup, seperti kebenaran, keindahan, kebaikan; (c) menjadi manusia yang sadar akan dirinya, sebagai pria atau wanita, dan sebagai warga negara; (d) mampu menghadapi tugasnya, bukan saja karena menguasai bidang profesinya, tetapi karena mampu mengadakan bimbingan dan hubungan sosial yang baik dengan lingkungannya (Sikun Pribadi, 1981: 11).

Dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 008-E/U/1975 tentang Pembakuan Kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, disebutkan bahwa " Pendidikan umum ialah pendidikan yang bersifat umum, yang wajib diikuti oleh semua siswa dan mencakup program Pendidikan Moral Pancasila yang berfungsi bagi pembinaan warga negara yang baik".

Dengan melihat definisi di atas pendidikan umum di Indonesia, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi lebih diarahkan pada MKU (mata kuliah umum), yang terdiri dari Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila , Kewiraan, Ilmu Sosial Dasar dan Ilmu Alamiah Dasar. Hal ini dikarenakan fungsi dari mata kuliah tersebut adalah pembinaan warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sementara itu di dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi no. 32/DJ/Kep/1983, tentang Kurikulum Inti Mata Kuliah Dasar Umum (*saat ini MKU – mata kuliah umum – penulis*), disebutkan bahwa: “Komponen Mata Kuliah Dasar Umum diarahkan untuk melegkapi pembentukan kepribadian dengan pengembangan kehidupan pribadi yang memuaskan, keanggotaan keluarga yang bahagia, dan kewargaan masyarakat yang prduktif serta kewargaan negara yang bertanggung jawab”.

Melihat pengertian di atas pendidikan umum di negara barat dan di Indonesia tidak jauh berbeda. Lebih lanjut dalam SK Dirjen Dikti tersebut dikemukakan sebagai berikut:

- a. Berjiwa Pancasila, sehingga segala keputusan serta tindakannya mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi mendahulukan kepentingan nasional dan kemanusiaan sebagai sarjana Indonesia.
- b. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agamanya dan memiliki tenggang rasa terhadap pemeluk agama lain.
- c. Memiliki wawasan komprehensif dan pendekatan integral di dalam menyikapi permasalahan kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, pertahanan keamanan maupun kebudayaan
- d. Memiliki wawasan budaya yang luas tentang kehidupan bermasyarakat dan secara bersama-sama mampu berperan serta di dalam pelestariannya.

Menurut Bunyamin Maftuh (1990: 52) dalam *tesis*-nya kriteria pendidikan umum di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendidikan umum merupakan suatu program pendidikan (yang terdiri dari beberapa mata pelajaran yang wajib diikuti oleh semua siswa (mahasiswa) dalam kedudukan mereka sebagai warga negara Indonesia.
- b. Pendidikan umum memberikan pendidikan yang general, dalam sikap, nilai, moral, pengetahuan, dan ketrampilan; bukan untuk membina spesialisasi akademis atau vokasional tertentu.

- c. Secara singkat, pendidikan umum di Indonesia bertujuan untuk membina siswa (mahasiswa) menjadi warga negara yang memiliki kepribadian Indonesia yang baik dan terpadu. Dengan kata lain, pendidikan umum di Indonesia berupaya membina manusia Indonesia seutuhnya.
- d. Pendidikan umum bukanlah program atau mata pelajaran pilihan yang dapat dipilih sesuai dengan kemampuannya, minat dan bakat siswa (mahasiswa);

Dengan demikian pendidikan umum di Indonesia merupakan pendidikan yang harmonis yang mengembangkan aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotor, namun dengan penekanan yang lebih besar pada aspek afektif. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan umum itu sendiri, yakni membina warga negara (dalam hal ini mahasiswa) yang memiliki kepribadian yang baik, terpadu dan terdidik; yang secara singkat disebut sebagai manusia Indonesia seutuhnya, yang pancasilais.

Integritas Bangsa

Disadari bahwa kendala utama untuk mencapai integritas (keutuhan) bangsa adalah pluralisme yang heterogen dari masyarakat Indonesia dan konstelasi geografis sebagai negara kepulauan. Untuk itu paham kebangsaan harus terus menerus dibangkitkan, sebab ia mengandung aspek kesejarahan yang bermakna dalam upaya memperkuat keyakinan akan kebenaran nilai-nilai Pancasila, dan aspek masa depan yang telah nyata menjadi kekuatan kepada para pendiri bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita masyarakat adil makmur berdasarkan nilai-nilai luhur yang memancar menjadi falsafah dan pandangan hidup : Pancasila.

Dalam menghadapi pluralisme tersebut, diperlukan paradigma yang rasional dan bijaksana, sehingga pluralisme tidak berkonotasi negatif, tetapi justru diposisikan secara positif dan konstruktif. Pluralisme mengandung tantangan serta peluang agar bangsa Indonesia sanggup dalam menghadapi berbagai perbedaan,

menunjukkan sikap toleran serta hormat dan memberikan pengakuan terhadap persepsi yang berbeda dengan persepsi yang kita miliki. Dengan demikian pluralisme tidak dengan sendirinya berkonotasi pertentangan, konflik, apalagi permusuhan.

Seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan satu kesatuan dalam wadah negara Indonesia. Penjelmaan integritas bangsa dan wilayah negara Indonesia tersebut disimpulkan dalam suatu lambang negara *Bhinneka Tunggal Ika* yang tertuang dalam PP No. 66 tanggal 17 Oktober, tahun 1951 dan diundangkan tanggal 28 November 1951, termuat dalam Lembaran Negara No. III/1951.

Makna *Bhinneka Tunggal Ika*, yakni meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam, serta beraneka ragamnya agama/kepercayaan di wilayah negara Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, namun dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu keadaan yang beraneka ragam itu bukanlah merupakan suatu perbedaan yang saling bertentangan, namun perbedaan itu justru merupakan daya penarik ke arah suatu kerja sama dalam suatu sintesa dan resultan, sehingga seluruh keanekaragaman itu terwujud dalam suatu kerjasama yang luhur, yaitu dalam integritas bangsa Indonesia.

Dalam kaitan dengan masalah keanekaragaman ini Kunto Wibisono Siswomihardjo (1996: 3) dalam uraiannya yang berjudul *Pluralisme dalam Semangat Bhinneka Tunggal Ika* memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bagi bangsa Indonesia, di mana keanekaragaman agama, budaya, tradisi ataupun adat istiadat yang tumbuh berkembang pada suku-suku tersebut di seluruh wilayah tanah air yang amat luas, memberikan konsekuensi logis bahwa pluralisme visi, dan orientasi serta aspirasi merupakan fakta yang harus diterima dan dihormati. Adanya pluralisme sebagai kenyataan yang harus kita transformasikan menjadi suatu asset atau modal pembangunan,

kiranya akan dapat kita wujudkan melalui dialog terus menerus dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Senada dengan yang dikemukakan di atas, Soedjatmoko mengatakan:

... bahwa suatu masyarakat majemuk lebih mampu untuk menyediakan berbagai jawaban terhadap perubahan; jawaban terbaik dapat ditiru oleh kelompok- kelompok lain dengan demikian memperkuat kemampuan bangsa untuk belajar dan menyesuaikan diri sebagai suatu keseluruhan. Pluralisme dapat juga merupakan suatu sumber kekuatan. (1986: 12).

Sejak negara ini didirikan, para pendiri sudah menyadari adanya pluralisme dalam kesukuan, agama maupun adat istiadat tetapi pilihan cita-cita mereka adalah tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, pembangunan yang kita lakukan saat ini adalah pembangunan manusia seutuhnya untuk mencapai cita-cita sebagai bangsa yang maju dan mandiri. Wawasan mengenai dimensi masyarakat bangsa yang maju itu bukan mengacu pada kemampuan rasio semata, namun pada dasarnya mengacu pada sikap, perilaku, dan budaya. Kemandirian yang perlu dibangun adalah kemandirian yang bukan bermakna isolasi diri, melainkan kemandirian yang tumbuh dalam suasana persaingan, kemandirian yang berpaham proaktif, bukan reaktif dan defensif (Edi Sudrajat, 1995).

Untuk mencapai perubahan sikap, perilaku dan budaya, mahasiswa perlu dibekali dengan hal-hal yang esensial dalam hidup secara terorganisasi dalam proses belajar mengajar. Bekal tersebut dapat menunjang cakrawala perhatian dan pengetahuannya agar ia tidak terpaku pada pengetahuan dan keahlian yang ditekuni. Dengan demikian mahasiswa perlu dibekali dengan nilai-nilai dan pengetahuan tentang agama, Pancasila, kewiraan dan hal-hal yang berkait dengan masalah-masalah lingkungan alam dan selanjutnya diharapkan mahasiswa akan mampu menemukan kepribadiannya dan menempatkan dirinya dalam per-kembangan masyarakat dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat.

Sesuai harapan tersebut, jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan umum yang diarahkan pada pembinaan kepribadian warga negara sebagai ciri khas sarjana lulusan pendidikan tinggi, maka pendidikan umum dalam, proses belajar mengajar berlangsung dengan memperhatikan keseimbangan antara penyampaian pengetahuan dan pembentukan nilai-nilai, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasi dan dipersonifikasi. Jika internalisasi dan personifikasi telah melekat pada mahasiswa, maka tujuan pendidikan umum itu sendiri akan tercapai dan integritas (keutuhan) bangsa akan terjamin.

Di lain pihak, kita akui pula bahwa integritas bangsa nampaknya mulai goyah dengan adanya pertikaian yang mengandung unsur SARA. Konflik antar suku, agama dan daerah yang ingin memisahkan diri dengan bangsa Indonesia nampak di ujung mata. Demikian juga kelompok elit pun sepertinya tidak mau saling mengalah, masing-masing "ngotot" dengan pendapatnya sehingga ini pun dapat menggoyahkan keutuhan bangsa. Sebetulnya pluralitas dan perbedaan pendapat merupakan hal yang sangat wajar dalam negara yang besar, apalagi jumlah pulau di Indonesia mencapai puluhan ribu, dengan aneka suku, bahasa, dan budaya yang berbeda. Konflik/pertikaian tidak perlu terjadi jika negara mampu menegakkan prinsip-prinsip supremasi hukum, keamanan, ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan. Hak dan kewajiban politik tidak dikaitkan dengan agama, suku atau *status group* yang lain, melainkan kepada individu yang bebas dari *status group*, yang berkedudukan sama di depan hukum. Rekonsiliasi antar mereka yang bertikai segera dilaksanakan. Semua persoalan dan kemungkinan solusinya itu harus diletakkan dalam kerangka reformasi kelembagaan dan pranata kenegaraan. Penyalahgunaan wewenang dan irasionalitas dukungan politik yang berkembang akhir-akhir ini segera dikikis, dengan memberdayakan lembaga kontrol dan keseimbangan (*checks and balance*).

Situasi "perpolitikan" yang demikian jika dikaitkan dengan pendidikan umum, akan sangat berpengaruh pada internalisasi dan personifikasi nilai-nilai. Hal

ini disebabkan para pemimpin tidak bisa dijadikan teladan, mereka justru “bertikai” sendiri dan mereka saling mengatakan bahwa mereka sendiri yang benar. Dengan demikian integritas (keutuhan) bangsa akan semakin memudar. Untuk mengatasi permasalahan ini, dalam pelaksanaan realisasi integritas bangsa senantiasa harus bersifat dinamis, yaitu berkaitan erat dengan upaya merealisasikan persatuan. Hal ini menjadi sangat penting, karena sebagaimana kita ketahui bahwa negara pada hakikatnya berkembang secara dinamis sejalan dengan perkembangan jaman, untuk itu perlu *dibarengi* semangat Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia. Dalam kaitannya dengan sila tersebut, segala aspek penyelenggaraan negara secara mutlak harus sesuai dengan sifat-sifat dan hakikat satu.

Kesesuaian negara dengan hakikat satu tersebut meliputi semua unsur-unsur kenegaraan baik yang bersifat jasmaniah maupun rokhaniah, baik yang bersifat kebendaan maupun kejiwaan. Hal itu antara lain meliputi rakyat yang senantiasa merupakan satu kesatuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia, wilayah yaitu satu tumpah darah Indonesia, pemerintahan yaitu pemerintah-an Indonesia yang tidak tergantung pada negara lain, satu bahasa yaitu bahasa nasional Indonesia, satu nasib dalam sejarah, satu jiwa atau asas kerokhaniah Pancasila. Kesatuan dan persatuan negara dan bangsa Indonesia mempunyai keberadaan sendiri di antara negara-negara lain di dunia ini. (Notonagoro, 1975: 113).

Integritas bangsa Indonesia, tidaklah sekedar suatu hasil yang sifatnya sementara, namun diharapkan berlangsung terus menerus. Hal ini dapat dimengerti karena dalam kenyataannya ada negara mengalami suatu goncangan karena rapuhnya persatuan nasionalnya, seperti negara Uni Soviet dan Korea. Supaya persatuan negara kita kuat, nilai-nilai kesatuan itu sendiri tetap harus kita pelihara dan kita lestarikan.

Menurut Notonagoro (1975: 106) persatuan Indonesia tersusun dalam suatu kesatuan majemuk tunggal yaitu:

- a. *Kesatuan sejarah*, yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah, sejak jaman prasejarah, Sriwijaya, Majapahit, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan sampai proklamasi 17 Agustus 1945.
- b. *Kesatuan nasib*, yaitu berada dalam satu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama yaitu dalam penderitaan penjajahan dan kebahagiaan bersama.
- c. *Kesatuan kebudayaan*, yaitu keaneragaman kebudayaan, tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional
- d. *Kesatuan wilayah*, yaitu keberadaan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan wilayah tumpah darah Indonesia
- e. *Kesatuan asas kerokhanian*, yaitu adanya satu ide, cita-cita dan nilai-nilai kerokhanian yang secara keseluruhan tersimpul dalam Pancasila. (Notonagoro, 1975: 106).

Dengan melihat uraian di atas, akan terlihat bahwa persatuan Indonesia dibentuk dalam suatu proses sejarah yang cukup panjang sehingga seluruh bangsa memiliki suatu persamaan nasib. Sesuai dengan makna yang dikandung dalam Sila Persatuan Indonesia, bangsa dan wilayah Indonesia, yang terdiri atas keluarga-keluarga, kelompok-kelompok, suku bangsa-suku bangsa; wilayah yang terdiri dari beribu pulau, kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang bersifat mutlak. Oleh Notonagoro hal semacam ini dicontohkan dengan sebuah telur, yang mempunyai satu kesatuan antara putih telur dan kuning telur. Sifat kesatuan tersebut bersifat mutlak. Demikian pula integritas (keutuhan) bangsa Indonesia bersifat mutlak, menolak keras separatisme. Integritas (keutuhan) bangsa dapat dicapai dengan berbagai cara, dan salah satu cara yang dipakai dalam menyatukan bangsa adalah melalui pendidikan umum.

Penutup

Pendidikan nasional pada dasarnya adalah proses pembangunan keseluruhan potensi dan aspek kepribadian manusia. Dalam rangka pembangunan potensi dan kepribadian manusia, keberadaan pendidikan umum sangat penting, khususnya di Perguruan Tinggi. Hal ini disebabkan mahasiswa mempunyai keahlian yang berbeda, sesuai dengan bidang studi yang ditekuni dan dipihak lain dituntut memiliki kepribadian yang utuh. Untuk memiliki kepribadian yang utuh, seseorang tidak hanya belajar tentang keahlian, namun harus belajar pula tentang pendidikan umum.

Tujuan diadakannya pendidikan umum, yakni membina mahasiswa berpribadi baik sesuai dengan agama yang dianut, berperan dalam pembangunan bangsa dan ikut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, serta mampu berpikir secara interdisipliner dan mampu memahami pikiran para ahli berbagai ilmu pengetahuan. Agar tujuan tersebut tercapai, berlangsungnya proses belajar mengajar dengan memperhatikan keseimbangan antara penyampaian pengetahuan dan pembentukan nilai-nilai, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasi dan dipersonifikasi. Jika internalisasi dan personifikasi telah melekat pada mahasiswa, maka tujuan pendidikan umum itu sendiri akan tercapai dan integritas (keutuhan) bangsa akan lebih terjamin.

Dalam pelaksanaan realisasi integritas bangsa senantiasa harus bersifat dinamis yaitu berkaitan erat dengan upaya merealisasikan persatuan sejalan dengan perkembangan jaman. Pluralisme (keadaan yang beraneka ragam) itu bukanlah merupakan suatu perbedaan yang saling bertentangan, namun perbedaan itu justru merupakan daya penarik ke arah kerjasama dalam suatu sintesa dan resultan, sehingga seluruh keanekaragaman terwujud dalam suatu kerjasama yang luhur, dalam integritas bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bunyamin Maftuh. 1990. *Studi Historis Perkembangan Pendidikan Umum dalam Kurikulum SMA sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1984*, (tesis). PPs. IKIP Bandung
- Edi Sudrajat, Menhankam 1995. *Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam Mendukung Kebangkitan Nasional Kedua*. Disampaikan pada Seminar Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara, Magelang.
- Faridah. 1992. *Konsep Dasar Pendidikan Umum serta Kedudukan MKDU .. dalam Pengembangan Program Pendidikan Umum*. (tesis). PPs. IKIP. Bandung
- Henry, B. Nelson. 1952. *Fifty-First Year Book of The National and Study of .. Education*. Chicago: The University of Chicago.
- Koento Wibisono Siswomihardjo. 1996. *Pancasila suatu Telaah Ideologik dalam Perspektif 25 Tahun Mendatang*. Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah . Mada, Yogyakarta.
- Notonagoro. 1980. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. CV. Pantjuran Tudjuh. Jakarta.
- Phenix, Philip H. 1964. *Realms of Meaning, a Philosophy of The Curriculum for General Education*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Soejadi. 1998. *Pancasila sebagai Sumber Hukum Indonesia*. (disertasi). Universitas .Gajah Mada.
- Suseno, Franz Magnis. 1991. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Kanisius, Yogyakarta.